

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah/Penelitian

Banyak sekali masalah yang muncul saat-saat ini. Dimulai dari pemerintah yang kurang kooperatif, aparatur negara yang terkena kasus korupsi, bencana alam, penyelewengan dana pendidikan, tenaga kerja Indonesia yang dikirim tanpa dokumen yang ilegal, sampai-sampai masalah rumah tanggapan yang sifatnya pribadi (*privat*) ikut melengkapi kompleksnya permasalahan yang di hadapi negara Indonesia. Kompleksitas masalah yang ada hendaknya menjadi suatu pembelajaran dan perenungan untuk semua.

Penyelesaian masalah di atas tidak mungkin dapat di selesaikan secara bersamaan dalam waktu yang cepat (*instan*). Semuanya membutuhkan waktu dan penyelesaian yang tepat. Berapa lama harus menunggu jawabannya adalah kembali kepada individu itu sendiri (Seluruh Rakyat Indonesia). Jika anda berada dalam lingkungan yang kental dengan sosial, kewajibannya adalah menyelesaikan masalah-masalah sosial, anda yang berada dalam lingkungan ekonomi berkewajiban menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, anda yang berada di lingkungan pendidikan menjadi suatu kewajiban untuk menyelesaikan dan meminimalisir semua permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan sehingga, jika semuanya berkerja sama seperti itu minimal kita bisa mengurangi tekanan masalah yang semakin mempersulit semuanya.

Masalah pendidikan saat ini memang memerlukan perhatian yang sangat *intensif*. Pemerintahpun berusaha menangani keadaan pendidikan dengan melakukan pembaharuan dalam pendidikan seperti peningkatan mutu pendidikan melalui program-program yang akan dilaksanakan dalam dunia pendidikan. Menurut data yang didapat Indonesia memang bukan negara yang menduduki peringkat tertinggi untuk bidang pendidikan, menurut informasi dalam sebuah laporan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa untuk bidang pendidikan, *United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*, menunjukkan Indonesia menduduki peringkat ke 62 dari 130 negara di dunia, Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menduduki peringkat ke 52, yang jelas hal lain dikemukakan mengenai EDI (*Education Development Index*) EDI menggambarkan rata-rata kemajuan pendidikan yang dicapai di suatu negara khususnya pada akses memperoleh pelayanan pendidikan dan kesetaraan gender. Indonesia 0,935 dibawah Negara Malaysia sebesar 0,945 dan Brunei Darussalam sebesar 0,965 (Jawa Pos .com/12 Desember 2008).

Diambil sebuah kesimpulan bahwa Indonesia memiliki kualitas pendidikan yang kurang dibanding dengan negara lain menurut Prof.Dr.Arief Rachman.M.Pd (Pakar Pendidikan Universitas Negeri Jakarta) menyatakan “harus dijadikan pembanding internal, kita jangan melihat dari kasus perkasus, namun harus dilihat secara global dengan melihat berapa faktor yakni seperti kondisi pemerintah, kondisi keuangan negara dan kualitas pendidikan akan menaik jika ada 4 (empat) faktor yakni kepemimpinan yang kuat, tata letak pemerintahan yang baik, partisipasi semua pihak, dan kesadaran terhadap permasalahan pendidikan. Kemudian siapa yang akan mempertanggung jawabkan keadaan seperti ini yakni

kita semua. Sebenarnya banyak sekali hal yang harus dibenahi dimulai dari pemerintah Indonesia itu sendiri yang memang berperan sebagai pembuat kebijakan khusus dalam bidang pendidikan, selanjutnya seluruh lapisan masyarakat harus mulai peduli dengan pendidikan karena pendidikan bukan hanya milik orang tertentu tetapi milik Negara Republik Indonesia (Jawa Pos .com/12 Desember 2008).

Pernyataan di atas pantas kita jadikan sebuah semangat baru dalam menanggulangi permasalahan khususnya pendidikan. Jika kita lihat untuk saat ini pemerintah mulai merespon keadaan di atas. Banyak usaha yang dilakukan pemerintah, seperti melakukan usaha perbaikan mutu pendidikan, salah satunya alokasi dana pendidikan sebesar 20%, pemberantasan putus sekolah, pengembangan kualitas satuan pendidikan sampai tujuan dari pendidikan mulai menjadi konsentrasi utama. Contoh nyata saat ini pemerintah mengajak calon peserta didik lulusan SMP untuk tertarik masuk jenjang lebih tinggi yakni Sekolah Menengah , terutama masuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Berkenaan dengan hal di atas SMK untuk saat ini sangat gencar di publikasikan karena mengingat lulusan SMK itu dinilai mempunyai kompetensi yang khusus sehingga mereka siap untuk terjun ke dunia kerja. Tetapi publikasi tentang SMK di media tentunya harus diimbangi dengan pemberian pelayanan pembelajaran akademik khususnya. Jangan sampai ketika kita menawarkan sesuatu itu tidak sesuai dengan kenyataannya, contoh promosi SMK Menurut Bembi Dwi Indrio (2005:26) menegaskan jika promosi dilakukan mengenai suatu *brand* (SMK) berarti harus ada pelayanan yang selaras dengan apa yang dijanjikan brand tersebut (*brand promises*), jika pelayanan yang diberikan tidak

sesuai berarti instansi atau lembaga yang mempromosikan tersebut akan mendapatkan masalah baru yakni citra (SMK) itu sendiri. Menurut Kartadinata (dalam Pendidikan.net 2007) ” Pemilihan Pendidikan kejuruan sangat baik, karena merupakan tindakan strategis yakni dalam meningkatkan standar kualitas SDM”. Lulusan SMK merupakan sumber daya manusia yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja yang keras. Semua lulusan dari SMK diakui oleh *public* memang memiliki kompetensi yang berbeda dengan lulusan sekolah menengah umum , yang membedakannya adalah lulusan SMK lebih menekankan kepada “ *Skill* “, tetapi perlu kita ketahui itu saja tidak cukup. Lulusan SMK saat ini keterserapan tenaga kerjanya mencapai 85% dari 750.000 ribu lulusan SMK yang masuk ke pasar kerja, dan 15% melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, Direktur Pembinaan SMK Joko Sutrisno menyatakan “ Lulusan SMK, dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di industri. " Jadi industri diharapkan kalau menerima pekerja diprioritaskan anak SMK dulu," ujarnya, Selanjutnya disampaikan pula penyerapan tenaga kerja terbesar adalah lulusan SMK terutama di bidang bisnis dan manajemen, teknologi informasi, dan teknologi rekayasa lainnya, perhotelan dan *tourisme* serta bidang lain seperti kriya seni dan pertambangan-pertambangan, bahkan disinyalir ada permintaan dari luar negeri sebanyak 200 teknisi khusus dibidang otomotif yang aktif berbahasa inggris. Kebijakan pengembangan SMK adalah salah satu alternatif untuk memfasilitasi hal tersebut, semua dilakukan guna memenuhi tuntutan di pasar kerja, hal ini terbukti dengan fakta yang menunjukkan ada banyak penambahan jumlah SMK pada bidang-bidang yang dinilai penting (*urgent*), contoh Pemkot Surabaya ingin sekali mengubah komposisi jumlah SMK dan SMA menjadi 70 berbanding 30

persen itu semua dipandang sangat masuk akal, namun kebijakan tersebut di atas harus di iringi dengan manajemen pengelolaan pendidikan kejuruan yang profesional dengan harapan terpenuhinya standar pelayanan minimal, tersedianya sekolah kejuruan dengan kualitas yang tinggi, kualitas guru, sarana dan prasarana pembelajaran dan terakhir keberadaan industri atau perusahaan yang nantinya akan menjadi tempat praktek kerja industri para calon tenaga kerja lulusan SMK dalam (Pendidikan.net 2007).

Hal tersebut Merupakan tugas berat bagi semuanya, karena tidak mungkin itu dilakukan seluruhnya oleh pemerintah, harus ada pihak-pihak lain yang membantu, pemerintah daerah beserta aparaturnya, dan yang lebih dekat tentunya lingkungan mikro pendidikan itu sendiri (sekolah), tetapi sekolah juga tidak akan mampu melakukan proses perbaikan mutu pendidikan jika tidak ada *transformer* yang ahli. Menurut Rochaety *et.al* (2005:7-8) dijelaskan pendidikan merupakan suatu sistem yang memiliki kegiatan cukup kompleks, meliputi berbagai komponen yang berkaitan antara satu sama lain, itu semua merupakan visualisasi dari komponen-komponen yang pokok dari pendidikan yakni input, proses, dan output, namun secara sederhana ditinjau kembali lingkup mikro pendidikan sebenarnya adalah guru (pendidik itu sendiri) dan siswa (peserta didik).

Alternatif pertama untuk menjawab tantangan-tantangan yang sudah dikemukakan diatas adalah hadirnya seorang guru profesional yang memang memiliki kompetensi dasar menjadi seorang guru. Tugas yang di emban guru memang tidak mudah, diharapkan pencapaian pendidikan yang mempunyai mutu berada di tangan guru, mengapa demikian karena sudah jelas gurulah yang sering berinteraksi dengan siswa sehingga diharapkan apa yang menjadi kemauan

seluruh pihak yang berada dalam dunia pendidikan bisa tersampaikan melewati guru. Tidak semua orang bisa menjadi seorang guru, karena untuk menjadi seorang guru diperlukan kompetensi yang khusus. Pendapat ahli yang menyatakan untuk menjadi seorang guru haruslah memiliki kompetensi dasar yakni menurut Cooper dalam Sudjana (1987) menjadi seorang guru itu tidak mudah, guru haruslah mempunyai kompetensi dasar seperti mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, kedua mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya, ketiga mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri sekolah, teman sejawat rekan kerja dan bidang studi yang dibinanya, terakhir mempunyai keterampilan teknik mengajar.

Guru yang mempunyai kompetensi seperti disebutkan di atas sangat diharapkan hadir saat ini karena mengingat itu merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda untuk waktu yang lama. Keadaan pendidikan di Indonesia saat ini mengalami penurunan, begitu pula keadaan gurunya yang ikut mengalami penurunan haruslah diadakan suatu perbaikan kualitas guru. Keadaan tersebut didukung dengan laporan dari UNDP yang menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 109 dari 172 negara dalam HDI (*Human Development Indeks*) dalam (Jawa Pos .com/12 Desember 2008). Sangat ironis keadaan guru di Indonesia sekarang ini, guru di Indonesia masih harus terus diberikan pengembangan dan pemahaman mengenai pentingnya penguasaan kompetensi guru secara intensif dan profesional sehingga tujuan pendidikan yang bermakna dan bermutu bisa tercapai. Jika tidak disikapi dengan cepat dampak yang terjadi akan semakin bertambah hal tersebut dibuktikan dengan contoh tingkat kelulusan Ujian Nasional sekarang menurun, untuk SMA dan SMK disinyalir menurun

tajam dibanding dengan tahun kemarin, dari 2,6 juta peserta ujian tidak lulus hampir 12% dengan begitu dinyatakan ada 260.000 ribu orang siswa SMA dan SMK yang tidak lulus Ujian Nasional . Dengan demikian sudah jelas peningkatan kualitas guru harus terus ditingkatkan, walaupun kita tahu tidak hanya gurulah yang harus bertanggung jawab dalam hal ini. Selain mutu guru yang harus diperhatikan mutu lulusannya (*output*) juga jangan diabaikan.

Mengenai kompetensi guru bagi seorang guru profesional haruslah menjadi kewajiban memiliki kompetensi dasar diatas demi tercapainya tujuan pendidikan. Walaupun memang kita ketahui keadaan ril memang tidak sesuai dengan harapan, ini terkadang menjadi hambatan dalam proses pencapaian tujuan khusus yakni prestasi belajar itu sendiri. Kita tidak bisa memberikan keputusan bahwa guru yang bersangkutan itu kurang berkompentensi dalam menjalankan tugasnya, tetapi keadaan ini mempunyai dampak yang kurang baik bagi peserta didik. Saat-saat ini pemerintah mulai berusaha meningkatkan mutu guru yang berkompentensi dengan beberapa cara, mulai dari pengembangan kompetensi guru melalui diklat, penataran, dan yang terbaru adalah sertifikasi, semua itu dilakukan salah satunya menginkatkan kualitas guru dan hasil belajar siswa (Mulyasa,2008:191). Terkait paparan diatas berarti harus ada usaha yang lebih intensif untuk menguatkan lulusan terutama lulusan SMK yakni dengan memberikan pelayanan akademik dan praktis yang sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Sekolah Menengah Kejuruan memiliki beberapa konsentrasi , ada yang konsetrasi di bidang bisnis dan manajemen, teknik, farmasi, dan kimia. Mengingat SMK adalah lulusan yang siap terjun ke dunia kerja, itu berarti diperlukan suatu sistem pembelajaran yang mendukung hal tersebut diantaranya

pemberian pelayanan pembelajaran yang merujuk kepada kompetensi guru yang diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan siswa. Pemberian pelayanan pembelajaran yang baik diharapkan bisa menghasilkan tujuan yang diharapkan terutama keberhasilan siswa (prestasi belajar siswa) . Karena penulis merupakan mahasiswa Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran yang kelak menjadi tenaga pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan khusus di Bidang keahlian Administrasi Perkantoran menetapkan sentral kajian mengenai **Hubungan Kompetensi Guru Dengan Prestasi Belajar Siswa Program Keahlian Administrasi Perkantoran Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Kabupaten Bandung.**

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Pembelajaran pada hakekatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan belajar di dalam kelas atau tatap muka maupun secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan berbagai media, dalam Tim MKDP Kurikulum dan Teknologi (2006:16). Hasil dari proses pembelajaran dengan pelayanan pembelajaran yang baik sudah tentu erat sekali hubungannya dengan prestasi belajar , itu mengidentifikasi bahwa sosok guru yang diharapkan adalah guru yang mempunyai kompetensi dasar yang memang seharusnya dimiliki oleh calon, dan yang sudah menjadi guru sekalipun demi tercapainya penguasaan hasil yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan tiada lain adalah prestasi belajar, prestasi belajar yang diartikan merupakan kecakapan nyata dari seseorang yang dapat dilihat dari tingkat penguasaannya terhadap berbagai materi pembelajaran di sekolah, prestasi belajar ini merupakan hasil belajar yang dapat berwujud pengetahuan, sikap-sikap dan keterampilan

(Sunarya,1990:80). Berdasarkan hal tersebut agar dalam penelitian ini tidak terlalu melebar dan terfokus maka ditentukan rumusan masalah yang terurai sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran tingkat kompetensi guru program keahlian Administrasi Perkantoran di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana gambaran tingkat prestasi belajar siswa program keahlian Administrasi Perkantoran di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kabupaten Bandung.
3. Seberapa besar hubungan antara kompetensi guru dengan prestasi belajar siswa program keahlian Administrasi Perkantoran di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kabupaten Bandung.

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis sebenarnya mempunyai banyak hal yang diharapkan, namun secara umum dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat hubungan antara kompetensi guru bidang keahlian manajemen perkantoran dengan prestasi belajar siswa khusus di Sekolah Menengah Kejuruan bidang keahlian bisnis dan manajemen program keahlian Administrasi Perkantoran. Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah terurai sebagai berikut :

1. Untuk Memperoleh gambaran mengenai kompetensi guru program keahlian Administrasi Perkantoran di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kabupaten Bandung.

2. Untuk mengetahui seberapa jauh tingkat prestasi belajar siswa program keahlian Administrasi Perkantoran di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa erat hubungan kompetensi guru dengan prestasi belajar siswa program keahlian Administrasi Perkantoran di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kabupaten Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dilihat dari segi teoritis erat sekali dengan pendidikan, dan yang menjadi sentral penelitian yakni mengenai kompetensi guru, sehubungan dengan hal tersebut maka menjadi sebuah kewajiban untuk melakukan sebuah penelitian yang lebih jelas mengenai penguasaan kompetensi guru, sehingga bisa dijadikan acuan bagi pelaksana pemberi pelayanan pembelajaran, harapan akhir dengan kompetensi guru tersebut maka prestasi belajar yang sesuai tuntutan.

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh insan yang berada di dunia pendidikan, baik manajemen sekolah maupun bagi guru, semoga bisa menjadi sebuah masukan yang kelak akan meningkatkan mutu pendidikan saat ini dan masa yang akan datang.